KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

Nomor SOP	:	SEK-OT.02.02-131
Tanggal Pembuatan	:	11 DESEMBER 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	11 MARET 2026
Disahkan oleh		**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
Nama SOP	:	**PENGUSULAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEWENANGAN PENGGUNA BARANG**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 9. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-17.PB.02.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum. 10. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum Nomor M.HH-23.OT.02.02 Tahun 2024	1. Mampu menggunakan Komputer/Printer/Scanner 2. Mampu menggunakan Internet 3. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel 4. Memahami Tata Naskah Dinas 5. Memahami Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara 6. Memahami Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
Keterkaitan:	**Peralatan / Perlengkapan :**
1. SOP Pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kewenangan Pengelola Barang	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Akses Internet 3. *User Account* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendaftaran :**
BMN hanya dapat diusulkan untuk perencanaan kebutuhan pemeliharaan, Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain, Penggunaan sementara, Penggunaan bersama, pengalihan status Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan setelah memperoleh penetapan status Penggunaan.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEWENANGAN PENGGUNA BARANG

No	Kegiatan	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB						MUTU BAKU			KETERANGAN
		SATKER/UE I	KANTOR WILAYAH	KEPALA BIRO BMN	KABAG PENATAUSAHAAN & PENGAMANAN BMN	KETUA TIM	JFU/JFT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Satuan kerja/ Unit Eselon I mengajukan usulan permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN	MULAI UE I	satker					Dokumen Permohonan PSP BMN Satker/ Eselon I	3 hari	Tiket Permohonan PSP BMN Satker/ Unit Eselon I beserta dokumen kelengkapan pada aplikasi SIMAN v2	- Usulan PSP BMN Satker melalui Kanwil - Usulan PSP BMN Kanwil dan Eselon I ke Pengguna Barang
2	Kantor Wilayah menerima dan melakukan verifikasi usulan Penetapan Status Penggunaan dari Satuan Kerja							Tiket Permohonan PSP BMN Satker beserta dokumen kelengkapan pada aplikasi SIMAN v2	2 hari	Usulan Permohonan PSP Satker	
3	Kantor Wilayah mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan BMN		T / Y					Tiket Permohonan PSP BMN Kanwil beserta dokumen kelengkapan pada aplikasi SIMAN v2	2 hari	Usulan Permohonan PSP BMN Kanwil	
4	Biro BMN menerima usulan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Kantor Wilayah/ Unit Eselon I dan menugaskan untuk menindaklanjuti usulan permohonan Penetapan Status Penggunaan							Tiket Permohonan PSP BMN Satker/Kanwil/ Unit Eselon I beserta dokumen kelengkapan pada aplikasi SIMAN v2	1 hari	Disposisi dan Dokumen Usulan PSP	
5	Menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian (verifikasi dan penilaian) usulan permohonan Penetapan Status Penggunaan							Disposisi dan Dokumen Usulan PSP	2 hari	Instruksi dan Dokumen Usulan PSP	
6	Melakukan penelitian usulan permohonan Penetapan Status Penggunaan							Dokumen Permohonan PSP BMN	2 hari	Hasil Penelitian dan Draft SK PSP atau Surat Klarifikasi	
7	Mengevaluasi rekomendasi hasil penelitian dan draft Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan atau Surat Klarifikasi					Y / T		Hasil Penelitian dan Draft SK PSP atau Surat Klarifikasi	1 hari	Hasil Penelitian dan Draft SK PSP atau Surat Klarifikasi	
8	Mengkoreksi rekomendasi hasil penelitian dan draft Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan atau Surat Klarifikasi				Y / T			Hasil Penelitian dan Draft SK PSP atau Surat Klarifikasi	1 hari	Hasil Penelitian dan Draft SK PSP atau Surat Klarifikasi	
9	Mengkoreksi rekomendasi hasil penelitian dan draft Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan atau Surat Klarifikasi			T / Y				Hasil Penelitian dan Draft SK PSP atau Surat Klarifikasi	1 hari	Hasil Penelitian dan Draft SK PSP atau Surat Klarifikasi	
10	Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan atau Surat Klarifikasi			SK PSP				SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum	7 hari	SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum	
11	Mengunggah Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN ke dalam aplikasi SIMAN							SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum	1 hari	SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum telah terupdate pada SIMAN	
12	Menyetujui dokumen Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN yang telah diupload pada aplikasi SIMAN							SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum telah terupdate pada SIMAN	1 hari	SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum telah terupdate pada SIMAN	
13	Menyetujui dokumen Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN yang telah diupload pada aplikasi SIMAN				SELESAI			SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum telah terupdate pada SIMAN	1 hari	SK PSP BMN yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro BMN a.n. Menteri Hukum telah terupdate pada SIMAN	